

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Pendidikan Kewarganegaraan (PPKn)

2.1.1 Definisi Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan Kewarganegaraan (PPKn) adalah mata pelajaran yang bertujuan membentuk warga negara yang cerdas, berkarakter, dan berkepribadian. **Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional**, PPKn bertujuan menanamkan kesadaran tentang hak dan kewajiban serta nilai-nilai demokrasi, Pancasila, dan kebangsaan. Hal ini penting untuk membentuk warga sekolah yang kritis, memiliki rasa tanggung jawab, dan mampu berpartisipasi aktif dalam masyarakat.

Pendidikan kewarganegaraan juga mengingatkan kita akan pentingnya nilai-nilai hak dan kewajiban warga sekolah. Setiap hal yang dikerjakan mestinya harus sesuai dengan tujuan dan cita-cita bangsa dan tidak melenceng dari apa yang diharapkan. Pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan yang berintikan demokrasi politik yang diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya, pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat, dan orang tua yang semuanya itu diproses guna melatih para siswa untuk berpikir kritis, analitis, bersikap serta bertindak demokratis dalam menjalankan kehidupan yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Pendidikan Kewarganegaraan (citizenship) merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan diri yang beragam dari segi agama, sosial-budaya, bahasa, usia, dan suku bangsa untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil dan berkarakter yang diamanaatkan oleh Pancasila dan UUD 1945. (Departemen Pendidikan Nasional, 2006). Proses pembelajaran PPKn di sekolah masih banyak yang menerapkan pembelajaran bersifat one way traffic atau bersifat satu arah. Pembelajaran hanya berpusat pada transfer ilmu pengetahuan dari guru kepada murid, sehingga pembelajaran bersifat pasif dan tidak memberi keleluasaan kepada siswa atau menggali materi lebih dalam dan tidak mencerminkan kelas PPKn sebagai laboratorium demokrasi.

Pada dasarnya pendidikan kewarganegaraan (*civic education*) bertujuan untuk mempersiapkan warganegara yang demokratis untuk mendukung dan mengembangkan kehidupan demokrasi. Tetapi dalam implementasinya sering diboncengi oleh kepentingan politik tertentu. Menurut Cholisin dalam Nurdin (2016:12) Pendidikan kewarganegaraan di Indonesia pada masa lalu lebih berorientasi kepada kepentingan pemerintah ketimbang kepentingan warga negara. Karena itu konsep dan materi pendidikan kewarganegaraan sangat kental dengan nuansa indoktrinasi, hegemoni, legitimasi dan mobilisasi politik.

Menurut sejarahnya pendidikan kewarganegaraan (*Civics*) berasal dari pendidikan tentang kewarganegaraan (*Citizenship*). Stanley E. Dimond menjelaskan bahwa *civis* adalah *citizenship* yang mempunyai dua makna, yaitu kewarganegaraan termasuk kedudukan yang berkaitan dengan hukum yang sah dan aktivitas politik dan pemilihan dengan suara terbanyak, organisasi pemerintah, badan pemerintah, hukum, dan tanggung jawab. Hal yang menarik dari pendapat Dimond bahwa adanya keterkaitan *Citizenship* dengan kegiatan belajar di sekolah mengingat pentingnya disiplin pengetahuan ini bagi kehidupan warga sekolah dengan sesamanya maupun dengan negara di mana mereka berada.

Pada perkembangan selanjutnya makna penting *citizenship* telah melahirkan gerakan warga negara (*civic community*) yang sadar akan pentingnya pendidikan kewarganegaraan (Ubaedillah, 2008:4). Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) menonjolkan unsur pendidikan politik yang bertujuan untuk membangkitkan kesadaran warga sekolah akan tempatnya dalam masyarakat. Tujuan utama PPKn adalah mendidik siswa agar dapat memenuhi potensi dirinya sebagai kekayaan bangsa dan negara sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

Dalam hal ini, PPKn sangat penting dalam membentuk identitas nasional yang koheren, meningkatkan pemahaman warga sekolah tentang hak dan tanggung jawab mereka sebagai anggota masyarakat, dan mempromosikan norma dan nilai yang sejalan dengan visi Pancasila tentang bangsa yang adil dan berbelas kasih. Siswa diharapkan mempelajari dan mempraktekkan konsep-konsep demokrasi seperti persatuan, keadilan, toleransi, dan kerjasama melalui

mata kuliah PPKn. Akibatnya, PPKn menjadi penting karena membantu siswa memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan pandangan yang mereka perlukan untuk menjadi anggota masyarakat yang terlibat, bertanggung jawab, dan produktif. PPKn sangat penting dalam membentuk identitas nasional yang koheren, meningkatkan pemahaman warga sekolah tentang hak dan tanggung jawab mereka sebagai anggota masyarakat, dan mempromosikan norma dan nilai yang sejalan dengan visi Pancasila tentang bangsa yang adil dan berbelas kasih. Siswa diharapkan mempelajari dan mempraktekkan konsep-konsep demokrasi seperti persatuan, keadilan, toleransi, dan kerjasama melalui mata kuliah PPKn. Akibatnya, PPKn menjadi penting karena membantu siswa memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan pandangan yang mereka perlukan untuk menjadi anggota masyarakat yang terlibat, bertanggung jawab, dan produktif. (Aria , 2023:24-25)

Sedangkan secara umum PPKn memiliki visi formal-pedagogis untuk mendidik warganegara yang demokratis dalam konteks pendidikan formal. Di Indonesia PPKn memiliki visi formalpedagogis, yakni sebagai mata pelajaran sosial dalam dunia persekolahan dan perguruan tinggi yang berfungsi sebagai wahana untuk mendidik warganegara Indonesia yang Pancasila.

Prinsip pendidikan kewarganegaraan yaitu membentuk masyarakat yang mampu berperan aktif dalam sistem pemerintahan demokratis. Berdasarkan prinsip tersebut, maka tujuan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, yaitu membentuk warga negara yang baik (good citizenship), yaitu membentuk peserta didik agar mampu berperan aktif dan bertanggung jawab bagi kelangsungan pemerintahan demokratis melalui pengembangan pengetahuan, karakter, dan keterampilan warga negara.

Ruang lingkup materi Pendidikan Kewarganegaran dalam Permendiknas No. 22 Tahun 2006 diklasifikasikan dalam ruang lingkup pembelajaran dalam standar isi, yang meliputi:

- a. Persatuan dan kesatuan bangsa.
- b. Norma, hukum, dan peraturan.
- c. Hak asasi manusia.

- d. Kebutuhan warga negara.
- e. Konstitusi negara.
- f. Kekuasaan dan Politik.
- g. Pancasila.
- h. Globalisasi.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa materi pembelajaran pada mata pelajaran PPKn terangkum dalam ruang lingkup mata pelajaran PKN yang terdiri dari beberapa aspek, meliputi: ruang lingkup persatuan dan kesatuan bangsa, ruang lingkup norma, hukum, dan peraturan, ruang lingkup HAM (Hak Asasi Manusia), ruang lingkup kebutuhan dan konstitusi negara, ruang lingkup kekuasaan dan politik, ruang lingkup pancasila, serta ruang lingkup globalisasi.

Pendidikan Kewarganegaraan memiliki fungsi strategis dalam membangun kesadaran berbangsa dan bernegara, terutama pada siswa di sekolah menengah. Selain itu, PPKn juga berperan dalam menanamkan rasa cinta tanah air, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan toleransi dalam keragaman.

2.1.2 Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan

Menurut Rosyada (2020;12), tujuan utama PPKn adalah untuk mempersiapkan siswa agar menjadi warga sekolah yang baik dan bertanggung jawab. Beberapa tujuan utama pendidikan kewarganegaraan adalah:

1. **Membangun karakter bangsa:** PPKn menanamkan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia seperti gotong royong, toleransi, dan cinta tanah air.
2. **Meningkatkan kesadaran hukum:** Siswa diajarkan untuk menghargai dan menaati peraturan serta hukum yang berlaku.
3. **Memupuk partisipasi aktif:** PPKn mengajarkan siswa untuk ikut serta dalam kegiatan sosial dan politik, seperti pemilu atau aksi sosial.
4. **Memperkuat rasa tanggung jawab sosial:** Pendidikan ini juga mendorong siswa untuk berperan aktif dalam masyarakat dengan memberikan kontribusi yang positif.

Menurut Magdalena,dkk (2020;28) Tujuan pembelajaran PKN yaitu dapat menjadi sarana belajar siswa untuk lebih mengenal Negara Kesatuan Republik

Indonesia, membentuk pribadi siswa sesuai dengan kebudayaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan bertujuan untuk membentuk generasi yang cinta tanah air dan ikut serta dalam mengisi kemerdekaan Republik Indonesia. Hal ini sejalan dengan pendapat Komarudin Hidayat dan Azyumardi Azra (2008:9-10)

Pendidikan Kewargaan bertujuan untuk membangun karakter (*character building*) bangsa Indonesia antara lain:

- a) membentuk kecakapan partisipatif warga negara yang bermutu dan bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,
- b) menjadikan warga negara yang cerdas, aktif, kritis, dan demokratis, namun tetap memiliki komitmen menjaga persatuan dan integritas bangsa,
- c) mengembangkan kultur demokrasi yang berkeadaban, yaitu kebebasan, persamaan, toleransi, dan tanggung jawab.

Tujuan pembelajaran PKn menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006 tentang standar isi satuan pendidikan dasar dan menengah adalah sebagai berikut :

- a. Berfikir secara kritis dan rasional serta kreatif dalam menanggapi isu-isu kewarganegaraan.
- b. Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan masyarakat, berbangsa dan bernegara serta anti korupsi.
- c. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat di Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lain.
- d. Berinteraksi dengan lembaga-lembaga lain dalam peraturan dunia secara langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Secara khusus tujuan mata pelajaran PPKn yang berisikan keseluruhan dimensi tersebut sehingga peserta didik mampu:

1. Memperlihatkan karakter yang mencerminkan pemahaman, penghayatan, dan memperoleh dan mematuhi sila-sila pancasila dengan melakukannya sendiri.
2. Tunjukkan komitmen Anda dengan berpandangan positif terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan pemahaman yang kuat terhadap ketentuan-ketentuannya.
3. Kemampuan berpikir kritis, rasional, dan kreatif; rasa sayang dan bangga yang dalam dan abadi terhadap bangsa Indonesia; dan komitmen terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Berpartisipasi sebagai orang dewasa yang terpelajar dan bertakwa, sesuai dengan cita-citanya sebagai ciptaan Tuhan, dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. (Lukman, 2017:5-6).

2.1.3 Komponen Utama dalam PPKn

Menurut Branson dalam Elisa (2017;23) terdapat tiga komponen utama yang perlu dipelajari dalam PKn yaitu civic knowledge, civic skills, dan civic dispositions.

- a. Civic Knowledge (pengetahuan kewarganegaraan) berkaitan dengan kandungan atau apa yang seharusnya diketahui oleh warganegara.
- b. Civic Skills (kecakapan kewarganegaraan) mencakup kecakapan intelektual dan keca-kapan berpartisipasi.
- c. Civic disposition (watak kewarganegaraan) mengisyaratkan pada karakter publik maupun privat yang penting bagi pemeliharaan dan pengembangan demokrasi konstitusional.

Pendidikan Kewarganegaraan terdiri dari beberapa komponen penting, di antaranya:

1. **Pancasila:** Nilai-nilai Pancasila menjadi landasan utama pendidikan PPKn, yang berfokus pada persatuan dan keadilan sosial.
2. **UUD 1945 dan hukum nasional:** Pemahaman tentang konstitusi dan hukum diperlukan agar siswa dapat menjalankan hak dan kewajiban dengan baik.

3. **Hak Asasi Manusia (HAM):** PPKn mengajarkan pentingnya menghargai hak dan kewajiban setiap individu, terutama dalam konteks demokrasi.
4. **Demokrasi dan partisipasi politik:** Siswa didorong untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi, seperti pemilihan umum dan diskusi publik.

Sejalan dengan itu kompetensi-kompetensi yang hendak diwujudkan melalui mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dibagi kedalam 3 kelompok, yaitu sebagai berikut :

1. Kompetensi untuk menguasai pengetahuan kewarganegaraan. Memahami tujuan pemerintahan dan prinsip-prinsip dasar konstitusi pemerintahan Republik Indonesia
 - a) Mengetahui struktur, fungsi dan tugas pemerintah daerah dan nasional sebagaimana keterlibatan warga negara membentuk kebijaksanaan publik.
 - b) Mengetahui hubungan negara dan bangsa Indonesia dengan negara-negara dan bangsa-bangsa lain beserta masalah-masalah dunia dan atau internasional.
2. Kompetensi untuk menguasai keterampilan kewarganegaraan
 - a) Mengambil atau menetapkan keputusan yang tepat melalui proses pemecahan masalah dan inkuiri.
 - b) Mengusai kekuatan dan kelemahan suatu isu tertentu
 - c) Membela atau mempertahankan posisi bagi mengemukakan argumen yang kritis logis dan rasional.
 - d) Memaparkan suatu informasi yang penting pada khalayak umum.
 - e) Membangun koalisi, kompromi, negosiasi, dan consensus (demokrasi).

2.2 Konsep Kedisiplinan

2.2.1 Pengertian Kedisiplinan

Kedisiplinan berasal dari kata “disiplin” yang mendapatkan awalan “ke” dan akhiran “an” yang merupakan konflik verbal yang berarti keadaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) “disiplin adalah tata tertib (di sekolah, kemiliteran, dsb); juga diartikan ketaatan (kepatuhan) kepada peraturan (tata tertib)”.

Disiplin amat erat kaitannya dengan tata tertib, aturan, atau norma yang berlaku dalam kehidupan bersama sebagai masyarakat. Kedisiplinan merupakan suatu set kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, keteraturan dan ketertiban, karena itu pengertian disiplin dapat dikotakan sebagai suatu hukuman, meskipun arti yang sesungguhnya tidaklah demikian. Dilihat dari asal katanya, menurut Wursanto (2000;108) disiplin berasal dari bahasa latin “Discipline” yang berarti pelatihan atau pendidikan kesopanan dan kerohanian serta pengembangan tabiat, jadi sifat disiplin berkaitan dengan pengembangan sikap yang layak terhadap pekerjaan.

Terkait dengan hal tersebut Brown dan Brown (1973;122) mengemukakan bahwa pentingnya mengajarkan dan menanamkan nilai-nilai kedisiplinan kepada peserta didik yang dalam prosesnya sekolah sebagai lembaga pendidikan harus menyiapkan nilai-nilai sebagai berikut.

1. Rasa hormat terhadap otoritas/kewenangan, disiplin akan menyadarkan setiap siswa tentang kedudukannya, baik di kelas maupun di luar kelas, misalnya kedudukan sebagai siswa yang harus hormat terhadap guru dan kepala sekolah.
2. Upaya untuk menanamkan kerjasama, disiplin dalam proses belajar mengajar dapat dijadikan sebagai upaya untuk menanamkan kerjasama, baik antar siswa, siswa dengan guru, maupun siswa dengan lingkungannya.
3. Kebutuhan untuk berorganisasi; disiplin dapat dijadikan sebagai upaya untuk menanamkan dalam diri setiap siswa mengenai kebutuhan

berorganisasi.

4. Rasa hormat terhadap orang lain; dengan ada dan dijunjung tingginya disiplin dalam proses belajar mengajar, setiap siswa akan tahu dan memahami tentang hak dan kewajibannya, serta akan menghormati dan menghargai hak dan kewajiban orang lain.
5. Kebutuhan untuk melakukan hal tidak menyenangkan, dalam kehidupan selalu dijumpai hal yang menyenangkan dan yang tidak menyenangkan. Melalui disiplin siswa disipkan untuk mampu menghadapi hal-hal yang kurang atau tidak menyenangkan dalam kehidupan pada umumnya dan dalam proses belajar mengajar pada khususnya.
6. Memperkenalkan contoh perilaku tidak disiplin; dengan memberikan contoh perilaku yang tidak disiplin diharapkan siswa dapat menghindarinya atau dapat membedakan mana perilaku disiplin dan yang tidak disiplin.

Objek kajian mengenai disiplin dalam proses belajar mengajar adalah penetapan tata tertib, yang diimplementasikan dalam bentuk kepatuhan terhadap peraturan sekolah. Tata tertib aturan, karena disiplin timbul dari kebutuhan untuk mengadakan keseimbangan antar apa yang dilakukan oleh individu dan apa yang diinginkan dari orang lain sampai batas-batas tertentu dan memenuhi tuntutan orang lain dari dirinya sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya dan tuntutan perkembangan yang luas.

Disiplin belajar merupakan suatu perbuatan dan kegiatan belajar yang dilaksanakan sesuai dengan aturan yang telah ditentukan sebelumnya. Kedisiplinan belajar sebagai suatu keharusan yang harus ditaati oleh setiap person dalam suatu organisasi, dengan sendirinya memiliki aktifitas yang bernilai tambah. Unsur pokok dalam disiplin belajar siswa adalah tertib ke arah siasat pembiasaan dalam disiplin disekolah akan mempunyai hubungan yang positif bagi kehidupan siswa yang akan datang.

Pada mulanya disiplin dirasakan sebagai suatu aturan yang menekan kebebasan siswa, tetapi bila aturan ini dirasakan sebagai suatu yang seharusnya dipatuhi secara sadar untuk kebaikan diri sendiri dan kebaikan bersama, maka lama kelamaan menjadi kebiasaan yang baik menuju kearah disiplin diri sendiri.

Dengan mengajarkan kedisiplinan kepada siswa, maka siswa akan mengetahui hal-hal apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan olehnya. Sebagaimana tujuan disiplin yang dikemukakan oleh Rachman (1999:83) bahwa tujuan disiplin sekolah adalah:

1. Memberi dukungan bagi terciptanya perilaku yang tidak menyimpang
2. Mendorong siswa melakukan baik dan benar
3. Membantu siswa memahami dan menyesuaikan diri dengan tuntutan lingkungannya dan menjauhi melakukan hal-hal yang dilarang oleh sekolah, dan
4. Siswa belajar hidup dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik dan bermanfaat.

Disiplin merupakan potensi yang termanifestasikan dalam bentuk perilaku menghormati segala peraturan, baik yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari sebagai bagian dari anggota masyarakat maupun peraturan yang berlaku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam kapasitasnya sebagai warga negara.

Disiplin adalah sesuatu yang berkenaan dengan pengendalian diri seseorang terhadap aturan (Rachman dalam Akmaluddin, 2019:3). Disiplin merupakan sikap mental yang dimiliki oleh individu dan pada hakikatnya mencerminkan rasa ketaatan dan kepatuhan yang didukung oleh kesadaran dalam menjelaskan tugas dan kewajibannya untuk mencapai tugas tertentu (Munawaroh, 2016: 114).

Disiplin adalah sikap dalam menaati peraturan serta ketentuan yang berlaku dan telah ditetapkan yang bertujuan untuk mengembangkan diri agar dapat berperilaku tertib (Naim, 2015:143). Jadi, aspek terpenting dari disiplin adalah ketaatan dan kepatuhan terhadap aturan-aturan dan kesadaran menjalankan tata tertib dan ketentuan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa disiplin adalah suatu keadaan sikap ketaatan dan kepatuhan pada peraturan, norma atau tata tertib, yang dilakukan secara sadar sebagai proses pengendalian diri untuk mencapai standar yang tepat dan tujuan yang diharapkan.

Tujuan disiplin sekolah adalah untuk menciptakan keamanan dan

lingkungan belajar yang nyaman terutama di kelas. Di dalam kelas jika seseorang guru tidak mampu menerapkan disiplin dengan baik maka siswa mungkin menjadi kurang termotivasi dan memperoleh penekanan tertentu dan suasana belajar menjadi kurang kondusif untuk mencapai prestasi belajar siswa. Ketika berbicara mengenai disiplin sekolah, maka kita tidak dapat melepaskan dengan munculnya persoalan perilaku negatif siswa. Perilaku negatif yang terjadi dikalangan siswa akhir-akhir ini tampak sudah sangat mengkhawatirkan seperti tindakan asusila, keterlibatan dalam obat-obatan terlarang, gang motor dan berbagai tindakan yang menjurus ke arah kriminal lainnya, yang tidak hanya merugikan diri sendiri, tetapi merugikan masyarakat umum.

Di lingkungan internal sekolah, pelanggaran terhadap berbagai aturan dan tata tertib sekolah masih sering ditemukan yang merentang dari pelanggaran tingkat ringan sampai dengan pelanggaran tingkat tinggi, seperti membolos sekolah, perkelahian, nyontek, perampasan, pencurian dan bentuk-bentuk penyimpangan perilaku lainnya. Munculnya beberapa masalah tersebut membuat diperlukannya suatu upaya pencegahan, dalam hal inilah nampak bahwa nilai-nilai disiplin dapat amat penting dilakukan di sekolah. Perilaku siswa terbentuk dan dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain faktor lingkungan, keluarga dan sekolah. Tidak dapat dipungkiri bahwa sekolah merupakan salah satu faktor dominan dalam membina dan mempengaruhi perilaku siswa.

Di sekolah seorang siswa berinteraksi dengan para guru yang mendidik dan mengajarnya. Sikap, teladan, perbuatan dan perkataan para guru yang dilihat dan didengar serta dianggap baik oleh siswa dapat meresap masuk begitu dalam ke dalam hati sanubarinya dan dampaknya kadang-kadang melebihi pengaruh dari orang tuanya dirumah. Sikap dan perilaku ditampilkan guru tersebut pada dasarnya merupakan bagian dari upaya pendisiplinan siswa di sekolah.

2.2.2 Jenis Kedisiplinan

Menurut Soegeng Prijodarminto disiplin dapat dibedakan menurut tingkatannya yaitu

1. Disiplinan pribadi yaitu perwujudan disiplin yang lahir dari kepatuhan atas

aturan-aturan yang mengatur perilaku individu.

2. Disiplinan kelompok yaitu perwujudan disiplin yang lahir dari sikap taat patuh terhadap aturan-aturan yang berlaku pada kelompok atau bidang-bidang kehidupan manusia, misalnya disiplin pada kesatuan-kesatuan atau perkumpulan-perkumpulan tertentu misalnya disiplin dalam kesatuan olah raga.

3. Kedisiplinan nasional yaitu wujud disiplin yang lahir dari sikap patuh yang ditunjukkan dari seluruh lapisan masyarakat terhadap aturan-aturan nilai yang berlaku secara nasional (Soegeng Prijodarminto, 1993: 25). Secara spesifik, jenis kedisiplinan dapat dibagi menjadi :

1. **Kedisiplinan Pribadi:** Berkaitan dengan kontrol diri dan kemampuan seseorang untuk konsisten dalam menjalankan tugasnya. Contohnya adalah mengerjakan tugas tepat waktu dan menjaga kebersihan pribadi.
2. **Kedisiplinan Sosial:** Berkaitan dengan kepatuhan terhadap norma sosial, seperti menghormati hak orang lain dan menaati peraturan di masyarakat.
3. **Kedisiplinan Akademik:** Melibatkan ketaatan siswa dalam memenuhi kewajiban akademik, seperti kehadiran tepat waktu, mengerjakan tugas sekolah, dan terlibat dalam kegiatan belajar mengajar.

2.2.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kedisiplinan

Menurut Ihsan Mz dalam Perwira (2022;18-19) berpendapat beberapa faktor yang mempengaruhi kedisiplinan siswa di sekolah :

a. Faktor Internal.

Faktor ini merupakan elemen yang berasal dari dalam sekolah itu sendiri, baik dari kepala sekolah, guru, karyawan dan siswa.

- 1) Minat, adalah kesediaan jiwa yang sifatnya aktif untuk menerima sesuatu dari luar
- 2) Emosi, adalah suatu keadaan yang mempengaruhi dan menyertai penyesuaian di dalam diri secara umum, keadaan yang merupakan penggerak mental dan fisik bagi individu dan dapat dilihat melalui tingkah laku luar

b. Faktor Eksternal.

Faktor ini memiliki ruang lingkup yang lebih luas dalam mempengaruhi kedisiplinan di sekolah.

- 1) Sanksi dan hukuman. Menurut Kartono, bahwa “hukuman adalah perbuatan yang secara intensional diberikan sehingga menyebabkan penderitaan lahir batin diarahkan untuk membuka hati nurani dan kesadaran si penderita akan kesalahannya”
- 2) Situasi dan kondisi sekolah. Rakhmat (2004) menyatakan bahwa faktor situasional sangat berpengaruh pada pembentukan perilaku manusia seperti faktor ekologis, faktor rancangan dan arsitektural, faktor temporal, suasana perilaku dan faktor sosial.

Sedangkan menurut Amri (2013: 167) menyebutkan beberapa faktor yang mempengaruhi kedisiplinan yaitu :

- a. Anak itu sendiri Faktor anak harus diperhatikan, mengingat anak memiliki potensi dan kepribadian yang berbeda-beda antara yang satu dengan yang lainnya. Pemahaman individu terhadap anak secara cermat dan cepat akan berpengaruh terhadap keberhasilan penanaman kedisiplinan.
- b. Lingkungan Situasi lingkungan akan mempengaruhi proses dan hasil pendidikan, situasi lingkungan ini antara lain: lingkungan fisik, lingkungan teknis dan lingkungan sosial kultural.
- c. Sikap pendidik Sikap pendidik juga mempengaruhi kedisiplinan anak. Sikap pendidik yang memiliki sikap baik, penuh kasih sayang, memungkinkan keberhasilan penanaman kedisiplinan pada anak. Hal ini dimungkinkan karena pada hakekatnya anak cenderung lebih patuh kepada pendidik yang bersikap baik. Sebaliknya, sikap pendidik yang kasar, keras, tidak peduli dan kurang wibawa akan berdampak pada kegagalan penanaman kedisiplinan di sekolah.
- d. Tujuan Faktor tujuan juga berpengaruh terhadap kedisiplinan seseorang. Tujuan yang dimaksud disini adalah tujuan yang berkaitan dengan penanaman kedisiplinan. Agar penanaman kedisiplinan terhadap siswa dapat berhasil maka tujuan tersebut harus ditetapkan dengan kelas, termasuk penentuan kriteria, pencapaian tujuan penanaman kedisiplinan di

sekolah sehingga dapat disimpulkan beberapa faktor yang mempengaruhi kedisiplinan siswa antara lain:

1. **Lingkungan keluarga:** Pola asuh orang tua yang baik akan membentuk kedisiplinan anak sejak dini.
2. **Lingkungan sekolah:** Tata tertib dan kebijakan sekolah yang konsisten akan mendorong siswa untuk bersikap disiplin.
3. **Lingkungan sosial:** Teman sebaya dan lingkungan masyarakat juga memengaruhi sikap disiplin seseorang.
4. **Peran guru dan pendidikan:** Guru berperan penting dalam memberikan teladan dan menanamkan nilai-nilai kedisiplinan kepada siswa.

2.2.4 Pengukuran Tingkat Kedisiplinan

Pengukuran tingkat disiplin belajar siswa diperlukan indikator-indikator mengenai disiplin belajar seperti yang diungkapkan Moenir (2010: 96) indikator-indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat disiplin belajar siswa berdasarkan ketentuan disiplin waktu dan disiplin perbuatan, yaitu:

- a) Disiplin Waktu, meliputi : Tepat waktu dalam belajar, mencakup datang dan pulang sekolah tepat waktu, mulai dari selesai belajar di rumah dan di sekolah tepat waktu, tidak meninggalkan kelas/membolos saat pelajaran, menyelesaikan tugas sesuai waktu yang ditetapkan.
- b) Disiplin Perbuatan, meliputi : Patuh dan tidak menentang peraturan yang berlaku, tidak malas belajar, tidak menyuruh orang lain bekerja demi dirinya, tidak suka berbohong, tingkah laku menyenangkan, mencakup tidak mencontek, tidak membuat keributan, dan tidak mengganggu orang lain yang sedang belajar.

Menurut Wibowo (2012: 100) indikator kedisiplinan adalah datang tepat waktu, membiasakan mengikuti aturan, tertib berpakaian, mempergunakan fasilitas dengan baik. Menurut Tu'u (2004:9) mengatakan bahwa indikator yang menunjukkan pergeseran atau hasil belajar siswa sebagai kontribusi mengikuti dan menaati peraturan sekolah meliputi: dapat mengatur belajar di rumah, rajin

dan teratur belajar, perhatian yang baik saat belajar di kelas. Naim (2012:146) berpendapat bahwa bentuk kedisiplinan dibagi menjadi empat yakni:

- 1) Hadir diruangan tepat waktu.
- 2) tata pergaulan sekolah.
- 3) mengikuti kegiatan ekstrakurikuler.
- 4) belajar dirumah.

2.3 Konsep Tanggung Jawab Sosial

2.3.1 Pengertian Tanggung Jawab Sosial

Sikap tanggung jawab menurut (Samani & Hariyanto, 2012;23) mengatakan bahwa sikap tanggung jawab adalah bagaimana seorang peserta didik dapat melakukan tugas sepenuh hati, bekerja dengan etos kerja yang tinggi, berusaha keras untuk mencapai prestasi terbaik (Giving The Best), mampu mengontrol diri, mengatasi stress, berdisiplin diri, dan dapat menjadi pemimpin yang akuntabel terhadap pilihan dan keputusan yang menjadi pilihan. Tanggung jawab terhadap masyarakat di sekelilingnya. Tanggung jawab sosial merupakan sifat-sifat kita yang perlu dikendalikan dalam hubungannya dengan orang lain (Ester,2023;17). Hal ini sejalan dengan pendapat **Rosyada (2020)**, tanggung jawab sosial mencakup partisipasi dalam kegiatan sosial, penghormatan terhadap hak orang lain, serta keterlibatan dalam kegiatan kemanusiaan. Tanggung jawab sosial adalah **kesadaran dan komitmen untuk berperan dalam menciptakan kebaikan bagi lingkungan sekitar.**

2.3.2 Indikator Tanggung Jawab Sosial

Sikap tanggung jawab menunjukkan apakah seseorang punya karakter yang baik atau buruk. Tanggung jawab menghendaki untuk mengenali apa yang sudah dilakukan karena tanggung jawab adalah akibat dari sebuah pilihan. Untuk mengukur apakah seseorang sudah memiliki tanggung jawab maka diperlukan indikator tanggung jawab. Indikator ini yang digunakan sebagai pedoman untuk

menilai bahwa seseorang sudah memiliki tanggung jawab atau sebaliknya.

Indikator tanggung jawab itu antara lain adalah:

- a) menyelesaikan semua kewajiban,
- b) tidak suka menyalahkan orang lain,
- c) tidak lari dari tanggung jawab,
- d) dan berani mengambil resiko.

Sikap tanggung jawab meliputi empat aspek yaitu

- (1) anak menghargai waktu,
- (2) anak mengerjakan tugas yang telah diberikan,
- (3) menjaga barang miliknya,
- (4) meletakkan barang sesuai dengan tempatnya.

Seseorang dapat dikatakan memiliki karakter tanggung jawab sosial apabila memiliki lima indikator karakter tanggung jawab sosial seperti, bertanggung jawab, berkontribusi positif, proaktif terlibat, membantu orang lain, dan menjaga kebersihan (Peterson, & Seligman, 2004).

2.4 Peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Pembentukan Kedisiplinan dan Tanggung Jawab Sosial

2.4.1 Peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Pembentukan Kedisiplinan

Pendidikan Kewarganegaraan (PPKn) memainkan peran penting dalam **menanamkan nilai-nilai kedisiplinan**. Materi PPKn yang mengajarkan tentang pentingnya aturan dan hukum mendorong siswa untuk berperilaku disiplin. Selain itu, pendidikan kewarganegaraan juga menekankan pentingnya kontribusi individu dalam kehidupan masyarakat melalui partisipasi aktif dalam kegiatan sosial. Menurut Telaumbanu (2023;310) Peran pendidikan kewarganegaraan dapat membentuk dan mengembangkan sikap disiplin pada siswa dapat ditanamkan dengan dukungan orang tua maupun guru dalam membentuk siswa menjadi pribadi yang bertanggung jawab, disiplin, dan berkarakter baik. Pendidikan kewarganegaraan menjadi alternatif penting untuk mempersiapkan generasi muda dengan bekal yang cukup, oleh karena itu orang tua, guru, dan lembaga sekolah

harus memiliki visi yang benar dalam menciptakan generasi muda yang memiliki kedisiplinan terhadap aturan yang telah ditetapkan. Hal serupa di sampaikan oleh Sulianti(2023:4140) bahwa pendidikan kewarganegaraan dapat mendorong peserta didik memiliki sikap kedisiplinan terhadap dirinya sendiri maupun di dalam kehidupan sehari-hari. Faktor yang mendukung peserta didik memiliki sikap kedisiplinan yaitu dari faktor keluarga, lingkungan, pergaulan peserta didik, terutama dalam lingkup sekolah. Dalam menanamkan sikap kedisiplinan bukan hanya peran sekolah saja yang dapat membentuk sikap kedisiplinan pada peserta didik keluarga pun juga harus menanamkan sikap kedisiplinan sejak dini. Dengan saling bekerja sama antara keluarga dan sekolah maka akan dengan mudah membentuk sikap kedisiplinan yang baik pada peserta didik.

Guru sebagai pendidik (fasilitator) mempunyai peranan penting dalam mengembangkan sikap disiplin diri kepada peserta didik. Pada saat proses pembelajaran berlangsung para guru dituntut untuk dapat melakukan kontrol eksternal dengan melakukan tindakan yang dapat membentuk karakter disiplin. Sehingga diharapkan peserta didik dapat mentaati peraturan, norma, dan batasan-batasan perilaku dirinya. Upaya untuk mengembangkan disiplin diri adalah melalui penanaman disiplin. Kedisiplinan merupakan contoh karakter yang mampu membuat orang menilai kita, kedisiplinan biasanya berkaitan dengan waktu, peraturan, dan kerapian, namun karakter disiplin faktanya sulit terbentuk pada diri siswa dan masyarakat, karena keinginan, kelalaian yang sering dilakukan oleh siswa, akan mencerminkan betapa sulitnya karakter disiplin untuk ditanam. Dengan terbentuknya rasa disiplin para peserta didik akan mengerti dan bisa diharapkan untuk menerapkan karakter disiplin yang baik dan benar serta menjadi suatu pembelajaran yang efektif.

Peran dari pendidikan kewarganegaraan dalam menanamkan sikap disiplin pada peserta didik Di masukannya menanamkan nilai kedisiplinan tidak pula untuk menjadikan siswa taat atas peraturan yang dibuat oleh sekolah untuk tidak dilanggar, dimasukkannya nilai-nilai kedisiplinan bukan hanya pokok bahasan tertentu saja, melainkan setiap pokok bahasan guru selalu berupaya untuk menanamkan nilai kedisiplinan. Sehingga, output yang dihasilkan sesuai dengan

yang diharapkan baik oleh guru Pendidikan Kewarganegaraan dengan harapan sekolah. Pentingnya Pendidikan Kewarganegaraan dalam menanamkan nilai kedisiplinan memang sangat berat karena kendala dan ancaman baik dari dalam dan dari luar sangat besar apabila lingkungan yang ada tidak mendukung. Tetapi keinginan hati yang ikhlas dari seorang guru pendidikan kewarganegaraan untuk mendisiplinkan siswa dan proses yang baik akan menghasilkan output yang baik, melalui sebuah pelajaran di kelas dan di implementasikan dalam bertingkah laku di dalam sekolah.

2.4.2 Peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Pembentukan Tanggung Jawab Sosial

Penanaman sikap tanggung jawab peserta sangat penting karena berpengaruh terhadap tingkah laku dari peserta didik itu sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Sikap tanggung jawab dapat membentuk peserta didik yang mempunyai karakter, berbudaya, sehingga peserta didik memiliki karakter yang baik yang dapat diterapkan pada dirinya maupun dalam masyarakat. Sikap bertanggung jawab pada peserta didik melalui pendidikan kewarganegaraan merupakan suatu yang diutamakan karena pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan yang memuat tentang moral, sikap dan tingkah laku peserta didik. Pendidikan kewarganegaraan sangatlah penting bagi peserta didik di samping menanamkan moral, tanggung jawab, rasa kebangsaan dan bernegara yang sesuai dengan ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Cicilia, dkk (2022;147) bahwa pendidikan kewarganegaraan memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter generasi penerus bangsa. Generasi penerus pada hakekatnya adalah generasi yang sebagai warga sekolah yang aktif, memiliki nilai moral, etika dan tanggung jawab serta memberikan dampak positif bagi masyarakat. PPKn membantu siswa memahami **peran mereka sebagai warga sekolah** dan pentingnya keterlibatan aktif dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, PPKn tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga mengembangkan sikap dan keterampilan sosial yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Peran pendidikan kewarganegaraan dalam mengembangkan sikap

bertanggung jawab peserta didik mempunyai pengaruh besar. Di dalam, pendidikan kewarganegaraan terdapat penanaman sikap tanggung jawab yang dimasukkan kedalam materi pelajaran di dalam kelas, sehingga peserta didik dapat belajar dan mempunyai rasa tanggung jawab yang besar dalam kehidupan baik dalam lingkungan sekolah dan lingkungan tempat tinggal. Sagala dalam Sulianti(2023:4139) mendefinisikan tanggung jawab sebagai suatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak maupun kewajiban ataupun kekuasaan. Secara umum tanggung jawab diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu. Melalui pendidikan kewarganegaraan dapat menanamkan sikap bertanggung jawab dimana seorang individu atau peserta didik melaksanakan perannya, hak ataupun kewajibannya dalam hal tertentu yang menuntut peserta didik untuk bersikap bertanggung jawab. Diharapkan dengan menanamkan sikap bertanggung jawab melalui materi pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di sekolah dapat menumbuhkan sikap bertanggung jawab pada diri peserta didik yang akan memberikan dampak yang baik bagi dirinya maupun orang lain. Materi yang ada di pendidikan kewarganegaraan bukan hanya membentuk sikap bertanggung jawab dan karakter pada peserta didik tetapi juga membentuk ataupun untuk mempersiapkan peserta didik kelak menjadi warga negara yang baik yang dapat membangun bangsa dan negaranya.

2.5 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir dalam penelitian ini berasumsi bahwa semakin baik penerapan **pendidikan PPKn**, semakin tinggi pula tanggung jawab sosial siswa. **Pendidikan PPKn** berfungsi sebagai variabel independen, sedangkan **tanggung jawab sosial** adalah variabel dependen. Interaksi antara keduanya diharapkan menghasilkan perilaku positif pada siswa, baik di lingkungan sekolah maupun masyarakat.

2.6 Defenisi Operasional

Definisi Oprasional Definisi oprasional dapat diartikan sebagai penegasan

istilah yang berfungsi untuk menghindari terjadinya perbedaan penafsiran atau pemahaman mengenai penelitian ini. Oleh sebab itu perlu penegasan judul penelitian, sebagai berikut:

1. Pendidikan Kewarganegaraan adalah proses pembelajaran yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai, sikap, pengetahuan, dan keterampilan kepada individu agar menjadi warga sekolah yang baik dan bertanggung jawab
2. Tanggung jawab sosial adalah Kesadaran dan tindakan untuk peduli terhadap lingkungan sekitar, masyarakat, dan sesama serta berkontribusi dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Adapun indikator tanggung jawab sosial adalah partisipasi dalam kegiatan sosial dan ekstrakurikuler, kepedulian terhadap teman dan lingkungan sekolah dan keterlibatan dalam aksi sosial, seperti kegiatan bakti sosial.

